



Kebijakan PPKM Berdampak Besar

PELAKU wisata memandang bahwa kebijakan PPKM sangat berdampak pada dunia pariwisata. Karena pada prinsipnya, kebijakan itu membatasi akses wisatawan untuk berkunjung ke objek-objek wisata.

"Kebijakan membuat situasi yang tidak menentu menjadi lebih pan-

jang. Pelaku industri pariwisata pasti semakin terdampak dengan perpanjangan PPKM," jelas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Set-

● ke halaman 15

Kebijakan PPKM

● Sambungan Hal 9

yo Aji, kepada *Tribun Jogja*, Minggu (14/2).

Dia menjelaskan, aspek aksesibilitas wisatawan merupakan salah satu hal utama dalam dunia pariwisata. Sehingga, bila terdapat pembatasan akses maka bakal memberi pengaruh besar bagi pelaku industri pariwisata.

"Dari sisi akomodasi, transportasi, biro perjalanan wisata, pramuwisata dan sebagainya bisa tidak tergerakkan," tuturnya.

Lumpuhnya dunia pariwisata dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino atau reaksi berantai terhadap sektor-sektor lainnya. Misalnya pada sektor UMKM di

DIY yang sebagian juga bergantung kepada kedatangan wisatawan

Pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk mencari solusi terbaik menjaga keberlangsungan industri pariwisata DIY ke depannya. "Harus ada solusi dan upaya agar kedua sisi yakni kesehatan dan ekonomi itu bisa tetap berjalan dengan baik," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta menjelaskan, protokol kesehatan termasuk kebijakan wajib swab antigen sebenarnya bisa dimaknai dengan kenormalan baru. "Dapat dianggap sama dengan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak," terangnya.

Harga terjangkau

Namun yang menjadi permasalahan, biaya untuk me-

lakukan tes Covid-19 tergolong mahal, dan itu harus ditanggung oleh wisatawan. Maka, Pemda DIY perlu mencari solusi untuk menyediakan metode tes Covid-19 dengan harga yang lebih terjangkau.

Harapannya wisatawan menjadi tak terbebani sehingga industri pariwisata di DIY dapat kembali bergeliat namun dengan tetap meminimalisasi potensi penularan. Sebab, sebagian besar wisatawan yang berkunjung telah menjalani pemeriksaan Covid-19.

"Inilah yang perlu dicarikan solusi. Pemda mesti mencoba berbagai metode untuk memperkecil biaya tes Covid-19," terangnya.

Huda pun mencontohkan, Pemda DIY dapat memanfaatkan alat skrining dengan

biaya yang lebih murah seperti inovasi GeNose dari UGM. "Kalau saat ini dengan antigen, biaya sekitar 200 ribuan, perlu dicoba dengan temuan baru seperti Genose UGM. Saya lihat di beberapa stasiun sudah ada penggunaan alat ini yang relatif murah dan cepat dibandingkan alat skrining yang lain," tuturnya.

Namun Huda memahami bahwa pemanfaatan GeNose secara lebih luas belum bisa direalisasikan. Pasalnya hasil penelitian lebih lanjut dan persetujuan dari pemerintah pusat masih dinantikan.

"Poinnya janganlah kita pertentangkan antara uji Covid-19 bagi wisatawan dengan ekonomi, tapi kita perlu cari solusi dan terobosan terkait biayanya," tegasnya. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 13 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005